

Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung dalam collaborative governance

Silviana Nababan^{1*}, Ani Nurdiani Azizah², Hanny Purnamasari³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: 1710631180135@student.unsika.ac.id

Abstrak

Upaya menjaga kinerja di suatu dinas adalah dengan upaya pelayanan umum yang sangat dipermudah, baik itu dalam penyampaian keluhan hingga masalah perizinan, dan pengoptimalan di bidang pelayanan Dinas terkait juga bekerja sama dengan dinas lain untuk menunjang keberlangsungan sektor pariwisata di Kota Bandung. Strategi kolaborasi ekonomi, sosial dan kecocokan pariwisata adalah tindakan yang mengkolaborasikan antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan pembagian keuntungan yang di semua pihak yang terlibat sehingga mendapat keuntungan dari usaha wisata tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari usaha di bidang pariwisata yang sedang beroperasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Pariwisata; kinerja; kolaborasi

The performance of the bandung city culture and tourism office in collaborative governance

Abstract

Efforts to maintain performance in a department is with the efforts of the public service is very quick and easy, in the submission of a complaint to licensing issues, and optimization in the service of a department associated with the department of others to support the sustainability of the tourism sector in Bandung city. Strategy economic collaboration and social compatibility of tourism is the act of collaboration between the government, public and private sector in the field of tourism as components that need each other. This is reinforced by the distribution of profits are evenly distributed in all parties involved so that the profit from the business in the field of tourism is operating. From the result of research conducted showed that this study used qualitative research methods.

Keywords: Tourism; performance; collaboration

PENDAHULUAN

Pariwisata yang termasuk dari pendapatan daerah di hasilkan dari seberapa banyak wisatawan yang berkunjung. Untuk meningkatkan ketertarikan seseorang dalam melakukan perjalanan pariwisata, maka penataan dan pengadaan berbagai destinasi wisata harus terus di maksimalkan. Bandung kerap dikenal sebagai kota Pariwisata, alasannya tentu berasal dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Bandung. Terhitung setiap tahunnya, 33% pendapatan daerah atau sebesar Rp740 miliar bersumber dari segala aktivitas pariwisata. Baik dari pajak hotel, hiburan, hingga restoran. Potensi pariwisata Kota Bandung juga menjadi andalah untuk Kota Bandung, tercatat ada 7,5 juta wisatawan domestik dan 155 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung di Bandung pada tahun 2018. Para wisatawan tersebut membelanjakan uangnya di Bandung rata-rata satu juta per-orang. Namun tentunya berbagai objek pariwisata yang ada di Bandung tentu tidak semata-merta berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, pemerintah turut serta mendorong kemajuan destinasi pariwisata yang ada di Bandung melalui berbagai hal agar eksistensi kota Bandung sebagai kota pariwisata tetap terjaga. Berbica mengenai bagaimana sebuah dinas dapat menjaga stabilitasnya dalam bekerja, maka kita akan bersinggungan dengan istilah kinerja.

Menurut (Veithzal, 2005:97), kinerja merupakan sebuah hasil suatu pihak atau kelompok secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sementara itu kinerja menurut Prawirosentono, merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai di dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika. Maka dari itu, karena kinerja mempersoalkan tentang bagaimana sebuah hasil dapat terwujud dari sebuah implementasi yang di cita-citakan, maka untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung dalam visi misinya.

Untuk mencapai misi yang telah di cita-citakan, diperlukan program untuk mendukung tumbuh kembang pariwisata yang ada di Bandung. Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menggalakan kerjasama di antara tiga pilar yang signifikan yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, tim peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana birokrasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung ini bekerja secara kolaboratif dalam meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam collaborative governance. Menurut Lexy J. Moleong (2000), metode kualitatif adalah metode yang dilangsungkan dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Yang pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan kenyataan ganda; dan kedua, metode ini merupakan metode yang menyajikan secara langsung mengenai bagaimana hubungan antara peneliti dengan responden; yang ketiga, metode ini dapat bersifat lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang akan dihadapi

Penelitian yang bersifat deskriptif ini mempunyai tujuan menggambarkan objek sasaran, mengidentifikasi sifat-sifat sasaran, keadaan kelompok tertentu. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yakni melihat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki andil penting dalam kondisi Bandung seperti saat ini yang memiliki tingkat pendatang sebagai wisatawan yang tinggi. Selain itu, tim peneliti memilih isu collaborative governance karena di dasari oleh keinginan tim peneliti mengenai bagaimana hubungan diantara tiga elemen penting (government, public sector dan civil society) dalam membangun dan mengatasi permasalahan yang ada di Kota Bandung.

Penelitian ini berlangsung pada tanggal 8 September 2019, adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertempat di JL. Ahmad Yani No.227, Babakan Surabaya, Kiaracondong, Cihapit, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokrasi pemerintahan indonesia

Birokrasi menurut Wahyudi Kumorotomo (2009:74) diartikan sebagai suatu sarana bagi setiap pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi yakni sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara sistematis atau teratur terhadap pekerjaan dari banyak orang. Sementara itu birokrasi menurut Weber (1978) adalah suatu bentuk organisasi yang pada penerapannya memiliki hubungan yang erat dengan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan menurut Rhodes (1996) governance sebagai self organizing dan inter-organizational network yang melibatkan setiap aktor non-negara sehingga menimbulkan ketergantungan antar organisasi. Dalam paradigma governance aktor yang terlibat dalam suatu pengambilan keputusan adalah government, private sector serta civil society. Ansell dan Gash menyebutkan bahwa collaborative governance adalah sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Ansell dan Gash menekankan enam criteria dalam collaborative governance. Pertama, diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan mencakup aktor non-pemerintah. Ketiga, partisipan terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum terorganisasi secara formal. Kelima, kebijakan diambil berdasarkan konsensus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Collaborative Governance merupakan proses dari struktur jejaring multiorganisasi lintas sektoral (government, private sector, civil society).

Sedangkan untuk indikator keberhasilannya, De Seve menyebutkan ada 8 (delapan) tipe penting untuk mengukur keberhasilan collaborative. (Sudarmo, 2011: 110–116). Delapan item tersebut meliputi:

Network structur (Struktur jaringan). Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama juga mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.

Commitmen to a common purpose (Komitmen terhadap suatu tujuan). Artinya mengacu pada alasan tentang mengapa sebuah jaringan harus ada serta yakni adalah karena perhatian dan komitmen yang dimiliki untuk mencapai segala tujuan yang positif.

Trust among the participants (Adanya saling percaya diantara para pelaku ataupun peserta yang terlibat dalam jaringan). Pada sebuah kolaborasi aspek yang penting adalah kepercayaan, kepercayaan yang terjalin didasarkan pada hubungan profesional dan sosial, keyakinan bahwa bagian terkait mempercayakan informasi atau usaha-usaha stakeholder dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya kepastian Governance (Kejelasan dalam tata kelola). Aspek ini terkait boundary dan exclusivity, rules, self determination, dan network management. Boundary dan exclusivity disini menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

Acces to authority (Akses terhadap otoritas). Memiliki arti bahwa tersedianya standar-standar atau ukuran ketentuan terhadap segala prosedur yang jelas yang dapat diterima secara luas.

Distribute accountability/responsibility (Pembagian akuntabilitas/responsibilitas). Pembagian governance penataan, pengelolaan, serta manajemen secara bersamaan dengan stakeholder lainnya dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan yang dengan demikian akan lahir pembagian tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Information Sharing (Berbagi Informasi) Artinya bahwa pada suatu kolaborasi sudah seharusnya ada kemudahan akses yang mencakup sistem, software dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Acces to resources (Akses terhadap sumber daya). Ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam mencapai tujuan network.

Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung dalam collaborative governance

Network structure

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berkolaborasi dengan berbagai elemen, dari mulai dinas-dinas yang berkaitan, pihak swasta, juga masyarakat. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh dinas terkait yang memadukan strategi kolaborasi baik dalam ekonomi sosial dan kecocokan pariwisata yang berkelanjutan karena seluruh komponen ikut andil dan telah menjadi sebuah lingkaran yang saling membutuhkan antar satu sama lain - hal ini diperkuat dengan pembagian keuntungan merata antara pihak investor dengan masyarakat yang turut terlibat bekerja memajukan sektor pariwisata sehingga mendapat keuntungan dari usaha pariwisata tersebut. Ini membuat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari usaha di bidang pariwisata yang sedang beroperasi.

Pemberdayaan serta deregulasi yang tepat dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung membuat masyarakat semakin menjadi kreatif sehingga mendorong pariwisata yang lebih unik dan menarik. Pihak swasta yang ikut andil dalam memberikan sarana kebutuhan bagi objek wisata swadaya melalui CSRnya. Adapun kolaborasi kinerja antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung dengan dinas-dinas lain terkait pemenuhan dan penataan laju transportasi pariwisata yaitu kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan yang sampai kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi dinas-dinas tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Kerjasama dengan Dinas PUPR dan Dinas Pertamanan juga dijalin untuk memastikan bagaimana design tata kelola bangunan atau kawasan di suatu tempat dapat menjadi estetik, terus terawat dan tidak kumuh. seluruh objek wisata di Kota Bandung kedalam sistem yang terintegrasi.

Commitment to a common purpose

Network ada karena komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tujuan Pariwisata kota Bandung telah di tulis dalam visi-misinya, berangkat dari hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berkomitmen mengupayakan pencapaian target melalui penyelesaian kendala maupun peningkatan potensi pariwisata Kota Bandung. Untuk mencapai target-target tersebut maka kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan berbagai elemen. Dalam rangka Commitmen to a common purpose, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berupaya memajukan sektor pariwisata juga menjaga konsistensi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dalam memajukan bidang pariwisata, sistem kolaborasi dan solidaritas dilakukan untuk memajukan pariwisata yang dapat dinikmati hasilnya secara bersama. Adapun dalam menjaga konsistensi kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu dengan mempermudah urusan-urusan pelayanan umum dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sendiri maupun bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.

Trust among the participants

Dalam mencapai tujuan suatu birokrasi adanya upaya saling memberikan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan semuapihak harus turut andil dalam bagiannya masing-masing dalam hal ini pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bertindak sebagai fasilitator dan pembuat regulasi juga sebagai controlling dalam pariwisata. Pihak swasta bertugas memberikan fasilitas atau kelengkapan yang berada di dalam pariwisata dan memberikan juga pelatihan swadaya melalui CSR. Masyarakat dapat menjadi objek atau subjek sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari keberadaan pariwisata. Ketiga pihak tersebut harus saling memberikan kepercayaan sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang berjalan dengan apa yang menjadi tujuan masing-masing elemen. Apabila ketiga

pihak tidak saling percaya maka akan menghambat efisiensipelaksanaan danefektifitas sehingga dapat membuat tujuan setiap elemen tidak tercapai.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempercayakan masyarakat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan ekonomi di wilayah masyarakat itu berada, tentunya untuk mencapai sebuah potensi yang matang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memberikan pelayanan yang baik dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga memberikan sebuah kepercayaan untuk membuat atau mengembangkan sebuah destinasi pariwisata yang tidak merugikan masyarakat, atau bahkan swasta juga berdasarkan aturan yang di cetuskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada sektor swasta yaitu untuk menturut sertakan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata. Ini membuat pihak masyarakat dan swasta sangat merasakan dampak dari pelayanan yang baik itu. Dari situlah akan muncul rasa saling mempercayai satu sama lain karena pemerintah memberikan pelayanan yang baik. Pihak swasta yang menanamkan modalnya juga mendapatkan keamanan dan masyarakat yang terserap menjadi tenaga kerja atau diberdayakan dengan cara lain dalam pengembangan pariwisata akan mengurangi jumlah pengangguran.

Adanya kepastian governance

Adanya kejelasan dan keterbukaan pemerintah mengenai informasi dan transparansi anggaran menjadi hal yang sangat penting. Di era digital ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sudah menggunakan media teknologi yaitu sebuah website dimana semua elemen masyarakat maupun swasta dapat mengakses mengenai jumlah anggaran dan juga tupoksinya. Website ini juga dilengkapi dengan struktur tujuan dan visi misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Disini sangat jelas sekali pemerintah kepastian pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam menerapkan sebuah kebijakan dan membuat regulasi yang nantinya dijalankan oleh pihak swasta dan juga masyarakat. Pihak swasta yang bertugas untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperti hotel harus mentaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk tidak mengizinkan layanan prostitusi di hotelnya., apabila pihak swasta melanggarnya maka setelah peringatan yang tidak diindahkan sebelumnya akan berefek pada pencabutan izin dalam mendirikan usaha oleh pemerintah. Dan masyarakat sebagai objek juga subjek sangat penting berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan opsi opsi atau ide-ide yang dapat diajukan dalam musrembang.

Acces to authority

Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan resmi dan legal untuk memerintah pihak lain agar bertindak dan taat kepada pihak yang mempunyai kuasa. Ketaatan lahir bisa melalui persuasi, sanksi-sanksi, permohonanan, paksaan dan kekuatan. Otoritas juga berkaitan dengan kekuasaan sebagai suatu pengaruh yang kuat yang bersifat mengendalikan atas pengarah perilaku seseorang. Otoritas juga bisa diterima oleh bawahan dengan alasan untuk mencapai persetujuan dan diterima oleh pekerja lainnya. untuk memberikan sumbangsih kepada suatu tujuan yang dianggap berfaedah, guna menghindari diterapkannya tindakan disipliner, agar tindakan sesuai dengan standar-standar moral yang berlaku selain untuk memperoleh balas jasa.

Pada poin kali ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menunjukkan hasil yang cukup memuaskan khususnya akses terhadap otoritas. Rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sangat perlu dalam suatu organisasi agar bisa mencirikan mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan mana yang bukan.

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016. Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;

Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Distribute accountability/responsibility

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Responsibility berasal dari kata latin 'responsus' yang awalnya digunakan untuk pemberian makna adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan. Gagal menyelesaikan penugasan dari kewajiban tersebut menjadi dasar dari adanya rasa malu dan bersalah.

Terkait responsibilitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selalu melakukan tinjauan kepada setiap aparatur birokrasi serta membuka layanan keluhan. Baik itu dari wisatawan maupun pelaku usaha wisata bilamana ada kendala-kendala yang timbul akibat beroprasinya tempat pendukung wisata: (hotel, cafe, kedai). Setiap masyarakat yang ingin mengurus sesuatu terkait urusan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata bisa melalui media daring, hal ini menunjukkan bahwasannya pengoptimalan layanan publik adalah salah satu ciri meningkatkan pelayanan masyarakat yang mana sejalan dengan menjaga konsistensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam urusan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Information sharing

Potensi wisata di Kota Bandung memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Kota Bandung adalah Kota yang terbilang lengkap dalam urusan wisata, dari wisata alam wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata seni budaya, wisata belanja, dan wisata sejarah. Namun dalam pengelolaan dan promosinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak bisa bergerak sendiri, untuk itu masyarakat dan penggerak pariwisata di ajak kerjasama untuk membantu mendorong potensi pariwisata di Kota Bandung dengan menggunakan media online untuk mempromosikan wisata-wisata di Kota Bandung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung lebih mengaktifkan promosi di media online dan layanan publik lainnya agar masyarakat lebih bisa mengenal dan bisa berinteraksi langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selain itu, guna mendukung promosi pariwisata Bandung, pihaknya membentuk Badan Promosi Daerah Kota Bandung (Bandung Tourism Promotion Board) yang melibatkan para warga netizen untuk mempromosikan Bandung di sosial media Facebook, Twitter, Instagram, maupun Youtube. Termasuk promosi melalui halaman website <http://www.bandungtourism.com> yang menyuguhkan berbagai informasi seputar agenda event wisata, hotel, resto, dan lokasi-lokasi wisata unggulan.

Acces to resources

Pemerintah di amanatkan untuk secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada kebebasan, dan berorientasi pada konsensus yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset secara bersama-sama seperti ketersediaan sumber daya keuangan. Ketersediaan keuangan bermaksud untuk mengkolaborasikan pemerintah, swasta dan masyarakat, sebagai modal dalam melaksanakan program kerja yang di lakukan oleh pihak-pihak tersebut. Modal yang ada di dapat dari pemerintah pusat dan pihak swasta. Sayangnya, investor dari luar kota Bandung masih mendominasi, pemodal dari kota Bandung yang berasal dari kota lain membawa keuntungan dari investasi di kota Bandung ke kota tempat pemilik modal itu tinggal sehingga menyebabkan ketimpangan sosial di kota Bandung relatif tinggi.

SIMPULAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya menerapkan indikator collaborative governance De Seve untuk meningkatkan performa pelayanan yang menguntungkan tiga elemen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ada beberapa permasalahan di Kota Bandung yang masih menjadi tugas penting yang harus segera di selesaikan antar pemerintah untuk menanggulangi permasalahan seperti kemacetan yang disebabkan oleh tata letak pariwisata yang masih perlu terus di tingkatkan. Selain investor yang di dominasi dari orang luar kota Bandung itu menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial yang ada di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- JabarProv. (2017). Kota Bandung-Profil Daerah.
- Putri, A. P. (2019). Nilai Budaya Pada Kelurahan Ubud Kabupaten Gianyar. *Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB)*, 68(1), 9–18.
- Zaini, Afrizal. (2014) .Pengertian Birokrasi Pemerintahan Indonesia.
- Noegra, Bonie. (2017). Potensi Budaya Dalam Perspektif Pariwisata Kota Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. (2019). Profil Disbudpar.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5
- Dwipayana, Ari. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Chang, Hyun Joo. (2009). Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea. *Internasional Review of Publik Administration* Vol. 13.
- Chrish Ansell dan Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. University of California, Berkeley.